



Ketimpangan Akses Pendidikan Agama dan Implikasinya terhadap Mobilitas Sosial

(Analisis Perspektif Teori Konflik)

Ita Fatmawati¹, Maftuh²

Universitas Kiai Abdullah Faqih, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: Itafatmawati1011@gmail.com, Maftuh@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 20 Januari 2026

ABSTRACT

Inequality in access to religious education remains a significant challenge within Indonesia's educational system. Although religious education is intended to play a central role in shaping moral values and character, disparities in quality and access persist due to socio-economic conditions, uneven educational policies, and unequal distribution of resources. This paper aims to examine inequality in access to religious education through the perspective of conflict theory and to analyze its impact on social mobility. This study employs a qualitative literature-based approach, drawing on the theoretical frameworks of Karl Marx, Max Weber, and Pierre Bourdieu, as well as recent scholarly works in the fields of sociology of education and Islamic education. The findings indicate that religious education functions not only as a medium for transmitting religious teachings, but also as a form of social and cultural capital that influences individuals' social positions. Unequal access to quality religious education tends to reinforce social stratification and limit opportunities for upward social mobility, particularly among marginalized communities. The study emphasizes that equitable access to religious education should be viewed as an integral part of broader social justice efforts. Without inclusive and sustained policy interventions, religious education may inadvertently perpetuate social inequality rather than serve as a means of empowerment and social transformation.

Keyword: educational inequality, religious education, conflict theory, social mobility

ABSTRAK

Ketimpangan akses terhadap pendidikan agama masih menjadi persoalan yang mengemuka dalam sistem pendidikan di Indonesia. Meskipun pendidikan agama diposisikan sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter dan nilai moral peserta didik, realitas di lapangan menunjukkan adanya perbedaan kualitas dan kesempatan belajar yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, kebijakan pendidikan, serta distribusi sumber daya yang tidak merata. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji ketimpangan akses pendidikan agama dengan menggunakan perspektif teori konflik, serta menganalisis implikasinya terhadap mobilitas sosial dalam masyarakat. Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah pemikiran tokoh-tokoh teori konflik, seperti Karl Marx, Max Weber, dan Pierre Bourdieu, serta berbagai hasil penelitian kontemporer dalam bidang sosiologi pendidikan dan pendidikan agama Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan agama tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ajaran dan nilai keagamaan, tetapi juga berperan sebagai modal sosial dan kultural yang dapat memengaruhi posisi sosial individu. Ketimpangan dalam akses dan mutu

pendidikan agama berpotensi memperkuat stratifikasi sosial dan membatasi peluang mobilitas sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan agama perlu dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Tanpa kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada pemerataan kualitas, pendidikan agama berisiko menjadi sarana reproduksi ketimpangan sosial, bukan sebagai instrumen pemberdayaan dan peningkatan mobilitas sosial.

Kata Kunci: Kesenjangan Pendidikan, Pendidikan Agama, Teori Konflik, Mobilitas Sosial

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu instrumen fundamental dalam pembangunan manusia dan pembentukan struktur sosial masyarakat. Melalui pendidikan, nilai, pengetahuan, serta keterampilan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sekaligus membuka peluang bagi terwujudnya mobilitas sosial dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan sering diposisikan sebagai sarana strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat kohesi sosial. Namun demikian, dalam praktiknya, sistem pendidikan tidak selalu berjalan secara netral dan merata, melainkan kerap merefleksikan bahkan mereproduksi ketimpangan sosial yang telah ada dalam masyarakat.

Di Indonesia, ketimpangan akses terhadap pendidikan masih menjadi persoalan yang signifikan, meskipun pendidikan telah diakui sebagai hak dasar setiap warga negara. Realitas empiris menunjukkan adanya disparitas dalam distribusi fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Ketimpangan tersebut tampak jelas antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil, khususnya kawasan 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Di wilayah-wilayah tersebut, keterbatasan infrastruktur pendidikan, kekurangan guru yang kompeten, serta minimnya akses terhadap teknologi pembelajaran masih menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, sehingga berdampak langsung pada mutu pendidikan yang diterima peserta didik.

Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada pendidikan umum, tetapi juga merambah pada ranah pendidikan agama. Pendidikan agama memiliki peran strategis yang tidak terbatas pada pengajaran aspek ritual dan doktrinal, melainkan juga berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai moral, pembentukan karakter, serta transmisi budaya dan modal kultural. Melalui pendidikan agama, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan sikap keagamaan yang moderat dan berkontribusi secara konstruktif dalam kehidupan sosial. Namun demikian, akses terhadap pendidikan agama yang berkualitas tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok masyarakat dengan modal ekonomi dan sosial yang memadai cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mengakses lembaga pendidikan agama unggulan, seperti madrasah berkualitas, pesantren modern, atau sekolah swasta berbasis agama dengan fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai. Sebaliknya, masyarakat kurang mampu atau yang tinggal di daerah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan agama bermutu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan agama berpotensi menjadi

sumber ketimpangan sosial yang bersifat laten melalui distribusi modal kultural yang tidak merata.

Untuk memahami fenomena tersebut secara lebih komprehensif, pendekatan teori konflik menjadi kerangka analitis yang relevan. Perspektif teori konflik memandang pendidikan—termasuk pendidikan agama—bukan semata-mata sebagai sarana integrasi sosial, melainkan sebagai arena kontestasi kepentingan dan distribusi kekuasaan antarkelompok sosial. Dalam sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik, kelompok yang memiliki modal lebih besar cenderung mendominasi akses terhadap pendidikan berkualitas, termasuk dalam penentuan kurikulum, pemilihan tenaga pendidik, dan pengelolaan lembaga pendidikan yang bersifat eksklusif. Dengan demikian, pendidikan agama dapat berfungsi sebagai mekanisme reproduksi sosial yang memperkuat posisi kelompok yang memiliki privilese dan mempertahankan ketimpangan struktural.

Ketimpangan akses dan disparitas kualitas pendidikan agama tersebut memiliki implikasi serius terhadap proses stratifikasi dan mobilitas sosial. Kelompok yang berhasil mengakses pendidikan agama berkualitas cenderung memperoleh modal kultural, pengetahuan, serta jaringan sosial yang lebih kuat, sehingga meningkatkan peluang mobilitas sosial vertikal. Sebaliknya, kelompok yang terpinggirkan dan hanya memperoleh pendidikan agama dengan kualitas rendah berpotensi mengalami stagnasi sosial. Kondisi ini memperkuat pola reproduksi ketimpangan antargenerasi dan mempertahankan struktur sosial yang timpang.

Oleh karena itu, isu pemerataan pendidikan—termasuk pendidikan agama—menjadi agenda yang mendesak untuk mendapatkan perhatian serius. Pemerataan pendidikan tidak cukup dimaknai sebagai ketersediaan lembaga pendidikan di setiap wilayah, tetapi juga harus mencakup peningkatan kualitas pembelajaran, distribusi tenaga pendidik yang berkeadilan, penyediaan fasilitas yang layak, serta jaminan akses yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanpa upaya nyata untuk mengatasi ketimpangan struktural ini, pendidikan agama berisiko memperkuat dominasi sosial-ekonomi dan menghambat terwujudnya mobilitas sosial yang adil dan berkelanjutan. (1) Bagaimana teori konflik digunakan untuk menjelaskan ketimpangan akses pendidikan agama di masyarakat? (2) Bagaimana ketimpangan akses pendidikan agama tersebut berdampak pada peluang mobilitas sosial?

(1) Menganalisis relevansi teori konflik dalam memahami ketimpangan akses pendidikan agama. (2) Menjelaskan pengaruh ketimpangan akses pendidikan agama terhadap dinamika mobilitas sosial dalam masyarakat (1) Manfaat Teoretis, Makalah ini diharapkan memperkaya kajian dalam sosiologi pendidikan dan sosiologi agama, terutama dalam penggunaan teori konflik untuk membaca relasi antara pendidikan, kekuasaan, dan struktur sosial. (2) Manfaat Praktis, Hasil kajian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah, pendidik, dan lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil terkait pemerataan pendidikan agama, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial yang bersifat struktural.

Dalam tradisi klasik sosiologi, *Karl Marx* memandang masyarakat sebagai ruang konflik yang ditandai oleh pertarungan kepentingan antara kelompok yang menguasai sumber-sumber produksi dan kelompok yang berada dalam posisi subordinat. Relasi kekuasaan tersebut tidak hanya berlangsung dalam ranah ekonomi, tetapi juga dilembagakan dan dilanggengkan melalui institusi-institusi sosial, termasuk pendidikan. Dari perspektif ini, pendidikan tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan berpotensi menjadi sarana reproduksi ketimpangan sosial yang telah ada.

Dalam konteks pendidikan agama, pandangan *Marx* menjadi relevan untuk menjelaskan bahwa akses terhadap lembaga pendidikan agama yang berkualitas tidak semata-mata ditentukan oleh motivasi individu, tetapi sangat dipengaruhi oleh posisi sosial-ekonomi keluarga. Keluarga dengan modal ekonomi yang kuat relatif lebih mudah mengakses pesantren unggulan atau madrasah bermutu, sementara keluarga dengan keterbatasan sumber daya sering kali hanya memiliki pilihan pada lembaga pendidikan agama dengan kualitas terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan agama dapat berfungsi sebagai mekanisme reproduksi sosial apabila aksesnya tidak dikelola secara adil.

Pemikiran *Marx* diperkaya oleh *Max Weber*, yang menegaskan bahwa stratifikasi sosial tidak hanya bertumpu pada kepemilikan ekonomi. *Weber* membagi struktur sosial ke dalam tiga dimensi utama, yaitu kelas (*class*), status (*status group*), dan kekuasaan (*party*). Dalam ranah pendidikan agama, dimensi status dan legitimasi sosial memainkan peran penting, karena lembaga pendidikan tertentu memiliki prestise yang memengaruhi cara masyarakat menilai para alumninya.

Akses terhadap lembaga pendidikan agama yang memiliki legitimasi tinggi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, budaya lokal, dan posisi dalam jaringan sosial. Dengan demikian, ketimpangan pendidikan agama tidak hanya bersumber dari perbedaan materi, tetapi juga dari hierarki status sosial yang diwariskan secara struktural.

Dalam perspektif teori konflik, pendidikan dipahami sebagai arena perebutan sumber daya simbolik, seperti pengetahuan, gelar akademik, legitimasi moral, dan otoritas sosial. Oleh karena itu, pendidikan agama tidak berada di luar dinamika konflik sosial, melainkan menjadi bagian integral dari proses tersebut. Lembaga pendidikan agama tidak hanya mentransmisikan ajaran keagamaan, tetapi juga membentuk identitas dan posisi sosial peserta didik.

Kualitas pendidikan agama yang diterima seseorang sering kali mencerminkan posisi sosial keluarganya. Madrasah unggulan dan pesantren populer dengan jaringan luas umumnya lebih mudah diakses oleh kelompok masyarakat yang telah mapan secara ekonomi dan sosial. Sebaliknya, kelompok marginal cenderung terkonsentrasi pada lembaga pendidikan agama dengan kualitas terbatas. Dalam kerangka ini, pendidikan agama berpotensi menjadi arena konflik laten yang memperkuat ketimpangan sosial.

(1) Faktor Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Kebijakan, Ketimpangan akses terhadap pendidikan agama merupakan hasil interaksi berbagai faktor struktural. Faktor ekonomi—seperti biaya pendidikan, jarak geografis, dan ketersediaan

fasilitas – menjadi hambatan utama bagi kelompok kurang mampu. Faktor sosial dan budaya, termasuk status keluarga, relasi sosial, serta orientasi nilai masyarakat, turut membentuk peluang pendidikan. Selain itu, kebijakan negara melalui distribusi anggaran, pembangunan sarana, dan penempatan guru agama berperan besar dalam menentukan tingkat pemerataan pendidikan.

Ketidakseimbangan faktor-faktor tersebut berdampak pada kesenjangan kualitas pendidikan agama, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Keterbatasan tenaga pendidik, fasilitas yang minim, serta materi ajar yang kurang mutakhir masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah. (2) Ketidakmerataan Akses antar Lembaga Pendidikan, Keberagaman lembaga pendidikan – sekolah negeri, madrasah, dan pesantren – merupakan kekayaan sistem pendidikan nasional. Namun, perbedaan kualitas fasilitas, kurikulum, dan tenaga pendidik antar lembaga menciptakan jurang akses yang signifikan. Pesantren tradisional sering menjadi pilihan kelompok marginal karena lebih terjangkau, tetapi tidak selalu memiliki kualitas yang setara dengan lembaga pendidikan agama unggulan. Kondisi ini secara tidak langsung memperkuat kesenjangan sosial dalam jangka panjang.

(1) Modal Budaya dalam Perspektif Pierre Bourdieu, Menurut *Pierre Bourdieu*, pendidikan berperan penting dalam membentuk modal budaya (*cultural capital*), habitus, dan kemampuan simbolik yang dihargai oleh masyarakat. Dalam konteks pendidikan agama, modal budaya tercermin dalam penguasaan pengetahuan keislaman, kemampuan membaca teks klasik, keterampilan dakwah, serta etika sosial. Alumni lembaga pendidikan agama unggulan cenderung memiliki modal budaya yang lebih diakui dan bernilai sosial tinggi.

Sebaliknya, peserta didik dari lembaga dengan fasilitas terbatas sering kali memiliki modal budaya yang kurang mendapatkan pengakuan sosial, meskipun memiliki komitmen religius yang kuat. Ketimpangan modal budaya inilah yang menjadi salah satu mekanisme reproduksi ketidaksetaraan sosial. (2) Nilai Moral sebagai Modal Sosial, Selain modal budaya, pendidikan agama juga menghasilkan modal sosial berupa jaringan alumni, relasi dengan tokoh agama, serta reputasi moral. Jaringan sosial ini dapat membuka peluang sosial dan profesional yang lebih luas, sehingga berkontribusi pada peningkatan mobilitas sosial seseorang.

Mobilitas sosial merujuk pada pergerakan individu atau kelompok dalam struktur sosial. Mobilitas horizontal terjadi tanpa perubahan status sosial yang signifikan, sedangkan mobilitas vertikal berkaitan dengan kenaikan atau penurunan posisi dalam hierarki sosial. Pendidikan agama yang berkualitas berpotensi membuka peluang mobilitas vertikal melalui akses terhadap profesi dan posisi sosial tertentu.

Namun demikian, mobilitas sosial tidak ditentukan oleh pendidikan semata. Modal ekonomi, modal sosial, dan peluang struktural turut memengaruhi peluang mobilitas. Ketimpangan akses pendidikan agama menyebabkan akumulasi keuntungan pada kelompok tertentu, sementara kelompok marginal berisiko mengalami stagnasi sosial. Dengan demikian, ketimpangan pendidikan agama berimplikasi langsung pada reproduksi ketidaksetaraan sosial.

METODE

Makalah ini disusun dengan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Metode ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis konseptual dan teoretis mengenai ketimpangan akses pendidikan agama serta implikasinya terhadap mobilitas sosial, dengan menggunakan perspektif teori konflik sebagai kerangka analisis utama. Penelitian kepustakaan memungkinkan penulis untuk menggali, membandingkan, dan mensintesis berbagai gagasan ilmiah yang relevan secara sistematis dan mendalam. Sumber data dalam penulisan ini terdiri atas buku-buku klasik dan kontemporer dalam bidang sosiologi pendidikan, sosiologi agama, serta teori sosial – khususnya karya-karya Karl Marx, Max Weber, dan Pierre Bourdieu – serta artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi akademik lain yang membahas isu ketimpangan pendidikan, pendidikan agama, dan mobilitas sosial di Indonesia. Sumber-sumber tersebut dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi tema, otoritas penulis, dan validitas akademiknya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, pembacaan kritis, serta pencatatan gagasan-gagasan kunci yang berkaitan dengan fokus kajian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep dan teori yang relevan, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menjelaskan relasi antara ketimpangan akses pendidikan agama dan dinamika mobilitas sosial. Analisis ini diarahkan untuk menunjukkan bagaimana pendidikan agama dapat berfungsi sebagai arena konflik dan mekanisme reproduksi sosial dalam struktur masyarakat. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi argumentatif yang terstruktur, sehingga mampu memberikan pemahaman teoretis yang komprehensif serta kontribusi konseptual terhadap kajian pendidikan agama dan ketimpangan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Konflik dalam Menjelaskan Ketimpangan Akses Pendidikan Agama

Dalam perspektif teori konflik, pendidikan tidak dipahami sebagai institusi yang sepenuhnya netral dan egaliter, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang sarat dengan relasi kuasa dan kepentingan. Ketimpangan akses terhadap pendidikan agama dapat dijelaskan melalui asumsi dasar teori konflik yang memandang masyarakat sebagai arena pertarungan antarkelompok dalam memperebutkan sumber daya, baik yang bersifat material maupun simbolik. Pendidikan agama, dalam konteks ini, merupakan salah satu sumber daya simbolik yang memiliki nilai sosial tinggi karena berkaitan dengan legitimasi moral, otoritas keagamaan, dan pengakuan sosial.

Pandangan Karl Marx membantu menjelaskan bahwa ketimpangan akses pendidikan agama berakar pada struktur ekonomi masyarakat. Kelompok sosial dengan kepemilikan modal ekonomi yang lebih kuat memiliki peluang lebih besar untuk mengakses lembaga pendidikan agama berkualitas, seperti madrasah unggulan atau pesantren modern dengan fasilitas memadai dan tenaga pendidik

yang kompeten. Sebaliknya, kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi cenderung terpinggirkan dan hanya memiliki akses pada lembaga pendidikan agama dengan kualitas yang relatif rendah. Dalam kondisi ini, pendidikan agama tidak lagi berfungsi sebagai instrumen emansipasi sosial, tetapi justru menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan struktural.

Kerangka Marxian ini dipertegas oleh analisis Max Weber yang menekankan bahwa stratifikasi sosial tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh status sosial dan kekuasaan. Dalam ranah pendidikan agama, dimensi status tampak pada prestise lembaga pendidikan tertentu yang diakui secara sosial dan simbolik. Akses terhadap lembaga pendidikan agama yang memiliki legitimasi tinggi sering kali mensyaratkan modal sosial dan kultural tertentu, seperti latar belakang keluarga religius terpadang, jaringan dengan tokoh agama, atau pengakuan sosial dalam komunitas tertentu. Dengan demikian, ketimpangan akses pendidikan agama tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga oleh eksklusi sosial berbasis status dan legitimasi.

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan ini semakin kompleks karena dipengaruhi oleh faktor geografis dan kebijakan pendidikan. Wilayah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap lembaga pendidikan agama berkualitas, sementara daerah terpencil dan kawasan 3T menghadapi keterbatasan serius dalam hal infrastruktur, distribusi guru agama, serta dukungan kebijakan. Perspektif teori konflik memungkinkan kita melihat bahwa ketimpangan tersebut bukan sekadar persoalan teknis atau administratif, melainkan bagian dari ketimpangan struktural yang terlembagakan dalam sistem pendidikan itu sendiri.

Dengan demikian, teori konflik memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami bahwa ketimpangan akses pendidikan agama merupakan hasil dari relasi kuasa yang tidak seimbang antar kelompok sosial. Pendidikan agama, alih-alih menjadi sarana pemerataan kesempatan, berpotensi menjadi instrumen dominasi simbolik apabila tidak disertai dengan kebijakan afirmatif dan distribusi sumber daya yang berkeadilan.

Dampak Ketimpangan Akses Pendidikan Agama terhadap Mobilitas Sosial

Ketimpangan akses pendidikan agama memiliki implikasi langsung terhadap peluang mobilitas sosial individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam kerangka teori konflik, mobilitas sosial tidak dipandang sebagai proses yang terbuka dan meritokratis, melainkan sangat dipengaruhi oleh akumulasi modal yang dimiliki sejak awal, baik modal ekonomi, sosial, maupun kultural. Pendidikan agama yang berkualitas menjadi salah satu sarana penting dalam akumulasi modal tersebut.

Kelompok masyarakat yang berhasil mengakses pendidikan agama berkualitas cenderung memperoleh modal kultural yang lebih tinggi, sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Bourdieu. Modal kultural ini mencakup penguasaan pengetahuan keislaman, kemampuan simbolik seperti retorika dakwah, pemahaman teks-teks klasik, serta internalisasi etika dan habitus religius yang dihargai oleh masyarakat. Modal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bekal

intelektual, tetapi juga sebagai sumber legitimasi sosial yang membuka peluang mobilitas sosial vertikal.

Selain modal kultural, pendidikan agama juga menghasilkan modal sosial berupa jaringan alumni, relasi dengan tokoh agama, dan keterhubungan dengan institusi keagamaan. Jaringan ini sering kali menjadi pintu masuk menuju posisi sosial strategis, seperti guru agama, pendakwah, penyuluh keagamaan, atau peran-peran kepemimpinan dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan agama berkualitas dapat berfungsi sebagai akselerator mobilitas sosial bagi mereka yang memiliki akses terhadapnya.

Sebaliknya, kelompok masyarakat yang hanya memperoleh pendidikan agama dengan kualitas terbatas cenderung mengalami hambatan dalam proses mobilitas sosial. Keterbatasan fasilitas, kualitas pengajaran, dan pengakuan sosial terhadap lembaga pendidikan yang diakses mengakibatkan rendahnya akumulasi modal kultural dan sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi pada stagnasi sosial dan memperkuat reproduksi ketimpangan antargenerasi.

Dalam perspektif teori konflik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas sosial tidak terdistribusi secara merata, melainkan cenderung mengikuti garis-garis ketimpangan struktural yang telah ada. Pendidikan agama, yang seharusnya menjadi sarana pembebasan dan transformasi sosial, justru berisiko memperkuat dominasi kelompok tertentu apabila akses dan kualitasnya tidak dikelola secara adil. Oleh karena itu, ketimpangan akses pendidikan agama memiliki dampak sistemik terhadap struktur sosial, bukan hanya pada level individu, tetapi juga pada pola stratifikasi masyarakat secara keseluruhan.

Implikasi Teoretis dan Sosial

Pembahasan ini menegaskan bahwa teori konflik relevan dan signifikan dalam membaca dinamika ketimpangan akses pendidikan agama dan dampaknya terhadap mobilitas sosial. Secara teoretis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan—termasuk pendidikan agama—tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa dan struktur sosial yang melingkupinya. Pendidikan agama bukan hanya ruang transmisi nilai-nilai keagamaan, tetapi juga arena produksi dan distribusi modal sosial serta kultural.

Secara sosial, pembahasan ini menunjukkan urgensi kebijakan pendidikan agama yang berorientasi pada keadilan sosial. Pemerataan akses pendidikan agama perlu dipahami tidak hanya sebagai pemerataan lembaga, tetapi juga pemerataan kualitas, legitimasi, dan peluang mobilitas sosial. Tanpa intervensi struktural yang serius, pendidikan agama berpotensi terus mereproduksi ketimpangan sosial dan menghambat terwujudnya mobilitas sosial yang inklusif.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan akses pendidikan agama merupakan fenomena sosial yang tidak berdiri secara netral, melainkan berkaitan erat dengan struktur sosial, relasi kekuasaan, dan distribusi modal dalam masyarakat. Melalui perspektif teori konflik, pendidikan agama dipahami bukan hanya sebagai sarana transmisi nilai-

nilai keagamaan, tetapi juga sebagai arena kontestasi antarkelompok sosial dalam memperebutkan sumber daya simbolik, legitimasi moral, dan peluang sosial. Teori konflik – khususnya pemikiran Karl Marx dan Max Weber – menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan agama yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh posisi sosial-ekonomi, status sosial, serta jaringan kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Kelompok masyarakat dengan modal ekonomi, sosial, dan kultural yang lebih kuat memiliki peluang lebih besar untuk mengakses lembaga pendidikan agama unggulan yang memiliki legitimasi tinggi. Sebaliknya, kelompok masyarakat marginal, terutama yang berada di wilayah terpencil dan kawasan 3T, cenderung terpinggirkan dalam akses terhadap pendidikan agama bermutu. Kondisi ini menjadikan pendidikan agama berpotensi berfungsi sebagai mekanisme reproduksi ketimpangan struktural.

Lebih lanjut, ketimpangan akses pendidikan agama terbukti memiliki dampak signifikan terhadap dinamika mobilitas sosial. Pendidikan agama yang berkualitas berperan penting dalam akumulasi modal kultural dan modal sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Modal tersebut membuka peluang mobilitas sosial vertikal melalui pengakuan sosial, jaringan keagamaan, dan akses terhadap posisi-posisi strategis dalam masyarakat. Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap pendidikan agama bermutu menyebabkan rendahnya akumulasi modal, sehingga memperkuat stagnasi sosial dan reproduksi ketimpangan antargenerasi. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa ketimpangan akses pendidikan agama tidak hanya berdampak pada kualitas pembelajaran keagamaan, tetapi juga berimplikasi luas terhadap struktur stratifikasi dan keadilan sosial dalam masyarakat. Pendidikan agama yang seharusnya berfungsi sebagai sarana pembebasan dan transformasi sosial berisiko justru memperkuat dominasi sosial apabila tidak disertai dengan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan struktural.

DAFTAR RUJUKAN

- Abudin, Nata. *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Azyumardi Azra. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Bowles, Samuel Herbert Gintis Samuel. *Schooling in Capitalist America*. New York, 1976. <https://archive.org/details/schoolingincapit00bowl>.
- Bourdieu Pierre and Passeron Claude Jean. *Reproduction in Education, Society and Culture*. London: Sage Publications, 1990. <https://archive.org/details/reproductionineducation>.
- Collins Randall. *Toward an Explanatory Science*. New York, 1975. <https://archive.org/details/conflictsociolog00coll>.
- Collins, Randall. *Conflict Sociology*. New York: Academic Press, 1975.
- Creswell, John W. , *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications, 2014. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book237357>.
- Emile, Durkheim. , *Education and Sociology*. New York: Free Press, 1956.

-
- John, Goldthorpe. *Social Mobility and Class Structure in Modern Britain*. Oxford: : Clarendon Press, 1987.
- Karl, Marx. : *A Critique of Political Economy*. London: Penguin Classics, 1990.
- — —. *Capital: A Critique of Political Economy*. London: Penguin Books, 1990. <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1>.
- — —. *The German Ideology Trans. C. J. Arthur*. New York: International Publishers, 1970. <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology>.
- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan. *Peta Mutu Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kemendikbud, 2021.
- Max, Weber. , *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.
- — —. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978. <https://archive.org/details/economysocietyweber>.
- — —. *From Max Weber: Essays in Sociology, Trans.* New York: Oxford University Press, 1958. <https://archive.org/details/frommaxweberessa00webe>.
- Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911260>.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015. <https://rajagrafindo.co.id/produk/pengembangan-kurikulum-pendidikan-agama-islam/>.
- Passeron Jean-Claude Bourdieu Pierre. *Reproduction in Education*. London: Sage Publications, 1990. <https://archive.org/details/reproductionined0000bour>.
- Pendidikan, 3. Kementerian. *Pendidikan Di Daerah 3T*. Jakarta: : Kemendikbudristek, 2021. <https://www.kemdikbud.go.id>.
- Pierre, Bourdieu. "The Forms of Capital," *Dalam Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, Ed. New York: Greenwood Press, 1986. <https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-capital.htm>.
- Pierre, Bourdieu 5. *A Social Critique of the Judgement of Taste (Cambridge, . Cambridge: MA: Harvard University Press, 1984. https://monoskop.org/images/e/e0/Bourdieu_Pierre_Distinction_A_Social_Critique_of_the_Judgement_of_Taste_1984.pdf*.
- Pitirim, Sorokin A. *Social Mobility*. New York: Harper & Brothers, 1959.
- Ritzer, George. *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill, 2014.
- S, Coleman James. "Social Capital in the Creation of Human Capital." *Journal of Sociology*, 1988, 95–120.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135478>.
- Tilaar. *Kekuasaan Dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta., 2009.
- Zamakhshari, Dhofier. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 2011.